

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kemiskinan

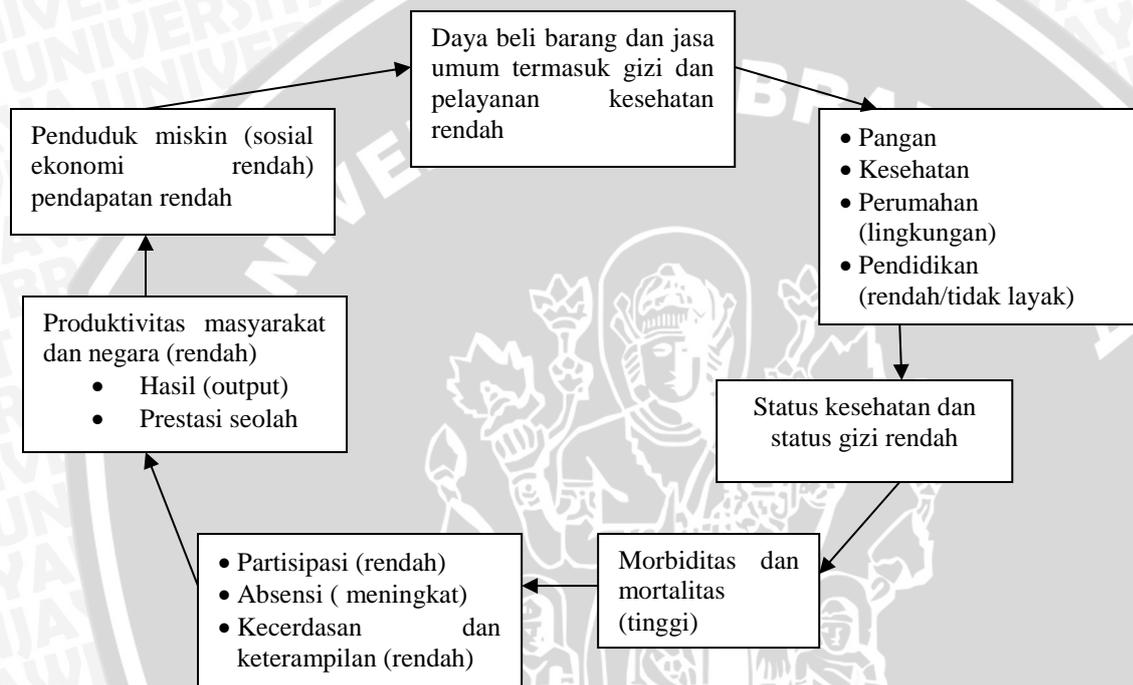
Kemiskinan merupakan akar permasalahan hilangnya martabat manusia, hilangnya keadilan, belum terciptanya masyarakat madani, tidak berjalannya demokrasi, dan terjadinya degradasi lingkungan (Faturachman, dkk., 2007). Terkait dengan kemiskinan, isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah masih relatif banyaknya jumlah penduduk miskin.

2.1.1 Definisi Kemiskinan

Kemiskinan didefinisikan sebagai standar hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Ketidakberdayaan penduduk miskin, menurut Mubyarto, 1997 (dalam Suryawati, 2005), disebabkan mereka tidak memiliki aset sebagai sumber pendapatan juga karena struktur sosial ekonomi tidak membuka peluang orang miskin ke luar dari lingkungan kemiskinan yang tak berujung pangkal.

Kemiskinan dipandang sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki atau perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Dalam arti luas, kemiskinan merupakan suatu fenomena multi face atau multidimensional. Chambers (dalam Nasikun, 2001) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu integrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (proper), 2) ketidakberdayaan (powerless), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), 4) ketergantungan (dependence), dan 5) keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis. Kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu: a. Kemiskinan absolut: bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. b. Kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan. c. Kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap

seorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar. d. Kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan. Perkembangan terakhir, menurut Jarnasy, kemiskinan struktural lebih banyak menjadi sorotan sebagai penyebab tumbuh dan berkembangnya ketiga kemiskinan yang lain.



Gambar 2. 1 Perangkap Kemiskinan (Poverty Trap)

Pada gambar 2.1 dapat dilihat jika perangkap kemiskinan sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan yang rendah akan berdampak terhadap partisipasi, absensi dan kecerdasan sehingga membuat pendapatan masyarakat miskin rendah.

Kemiskinan menurut *World Bank Institute* (2005) adalah seseorang dengan barang yang dibutuhkan lebih banyak atau lebih besar daripada pendapat yang dapatkan, dalam hal ini fokus utamanya terdapat pada rumah tangga ataupun individu yang memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka. Kemiskinan tersebut dapat diukur dengan membandingkan pendapatan individu dengan konsumsi yang dibutuhkan.

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (2014), seseorang dapat dikatakan sebagai individu miskin apabila memiliki pengeluaran rata-rata sebesar Rp 254.380,00 per bulan/orang. Besaran ini diukur berdasarkan tingkat kebutuhan makanan dan non makanan. Sedangkan kemiskinan dapat pula dilihat dengan standar garis kemiskinan (poverty line) makanan dan non makanan. Garis kemiskinan makanan yaitu nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan dasar makanan setara dengan 2100 kalori per kapita per hari. Garis kemiskinan non makanan adalah besarnya rupiah untuk memenuhi kebutuhan minimum non makanan seperti perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan, pakaian dan barang/jasa lainnya.

2.1.2 Indikator Kemiskinan

Menurut *World Bank Institute* (2005), berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, terdapat 4 indikator kemiskinan yang dapat digunakan yaitu:

1. *Headcount Index*, yaitu prosentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK);
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan;
3. Indeks Keparahan kemiskinan (*Poverty Saverity Index*) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.
4. Indeks Kemiskinan Manusia (*Human Poverty Index*) yang merupakan indikasi standar hidup suatu negara untuk melengkapi Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*). Indeks kemiskinan manusia fokus pada kekurangan dalam tiga elemen penting dari kehidupan manusia yang terdapat pada HDI yaitu angka harapan hidup, pengetahuan dan standar kehidupan yang layak.

2.1.3 Indikator Penerima Raskin

Program Raskin adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan miskin). Program raskin sendiri merupakan tanggung jawab semua pihak untuk mesukseskannya karena merupakan program nasional lintas sektoral baik

vertikal (Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah) maupun horizontal (lintas Kementerian/Lembaga). Program Raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran dalam memenuhi kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. (TNP2K, 2015).

Penentuan kriteria penerima manfaat RASKIN sering menjadi persoalan yang rumit. Dinamika data kemiskinan memerlukan adanya kebijakan lokal melalui musyawarah Desa/Kelurahan. Musyawarah ini menjadi kekuatan utama program untuk memberikan keadilan bagi sesama rumah tangga miskin. Rumah tangga yang berhak menerima beras Raskin, atau juga disebut Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin, adalah rumah tangga yang terdapat dalam data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan disahkan oleh Kemenko Kesra RI. Tahun 2012, Program Raskin menyediakan beras bersubsidi kepada 17,5 juta RTS-PM dengan kondisi sosial ekonomi terendah di Indonesia (kelompok miskin dan rentan miskin). Sedangkan untuk tahun 2013, Program Raskin menyediakan beras bersubsidi kepada 15,5 juta RTS-PM.

Jumlah RTS-PM Program Raskin nasional tahun 2014 adalah sebanyak 15.530.897 rumah tangga (tidak mengalami perubahan dari tahun 2013), yaitu rumah tangga yang menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai penanda kepesertaannya, atau Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) untuk rumah tangga pengganti hasil musyawarah desa/kelurahan (musdes/muskel). Jumlah RTS-PM Program Raskin 2014 tersebut meliputi sekitar 25 persen penduduk dengan peringkat kesejahteraan terendah secara nasional, yang mencakup rumah tangga miskin dan hampir miskin. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp 1.600 per kg netto di Titik Distribusi (TD).

2.2 Infrastruktur

Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar fisik yang diperlukan sebagai layanan dan fasilitas penunjang perekonomian. Dengan ketersediaan infrastruktur seperti jalan, listrik, air bersih, sanitasi, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan sebagainya memiliki suatu hubungan yang sangat kuat dengan pertumbuhan perekonomian suatu wilayah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada wilayah tersebut. Menurut Bappenas (2003), penyediaan infrastruktur merupakan faktor kunci dalam mendukung adanya pembangunan nasional.

Infrastruktur ekonomi bagian dari modal suatu saham perekonomian yang digunakan untuk memfasilitasi produksi ekonomi, atau melayani masukan untuk produksi (misalnya listrik, jalan, dan pelabuhan). Hal ini membantu untuk menghasilkan barang yang dikonsumsi oleh rumah tangga (misalnya air, sanitasi dan listrik). Ekonomi infrastruktur dapat dibagi lagi menjadi tiga kategori: utilitas (listrik, pipa gas, telekomunikasi, air dan sanitasi, pembuangan air kotor dan pembuangan limbah padat), publik karya (jalan dan tangkapan air di bendungan, irigasi dan drainase) dan transportasi (kereta api, saluran air dan pelabuhan laut, bandara dan transportasi perkotaan sistem).

Infrastruktur sosial, di sisi lain, meliputi layanan seperti kesehatan, pendidikan dan rekreasi. Hal ini baik langsung dan tidak langsung berdampak pada kualitas hidup. Infrastruktur sosial meningkatkan tingkat produktivitas dalam kegiatan ekonomi secara tidak langsung seperti rekreasi, pendidikan, kesehatan dan keselamatan. Manfaat tidak langsung adalah meningkatkan pelayanan kesehatan primer, misalnya adalah peningkatan produktivitas, yang pada gilirannya menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan riil yang lebih tinggi. Infrastruktur sosial juga memfasilitasi investasi modal manusia yang menjamin pemanfaatan yang lebih baik oleh beberapa modal fisik saham perekonomian dan dengan demikian meningkatkan produktivitas dari angkatan kerja. Dampak terhadap pertumbuhan mirip dengan peningkatan penyediaan modal-modal. Infrastruktur sosial juga meningkatkan kualitas hidup rakyat dengan memberdayakan ekonomi, politik dan sosial, serta pengentasan kemiskinan (Bhattacharyay, 2011).

Menurut *World Bank Institute* (2005) terdapat beberapa penyebab utama atau yang berhubungan dengan kemiskinan, yaitu pada karakteristik tingkat regional yang meliputi, kerentanan terhadap banjir atau topan, keterpencilan, kualitas pemerintah, hak milik tanah dan penegakannya. Pada karakteristik tingkat masyarakat yaitu ketersediaan infrastruktur (jalan, air, listrik) dan pelayanan (kesehatan, pendidikan), kedekatan terhadap pasar; dan hubungan sosial. Pada karakteristik rumah tangga dan individu adalah demografi: struktur umur, rasio ketergantungan; ekonomi: status pekerjaan, jam kerja, properti yang dimiliki; sosial: kesehatan dan status gizi, pendidikan dan tempat tinggal. Analisis regresi dapat dilakukan untuk mengidentifikasi dampak dari setiap karakteristik tersebut pada pendapatan atau pengeluaran per kapita.

2.2.1 Jalan

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006, jalan didefinisikan sebagai prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk pada

bangunan pelengkap serta perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan memiliki peran yang penting dalam pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada pada wilayah disekitarnya. Selain itu peran adanya jaringan jalan adalah sebagai media dalam pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Infratraktur jalan dapat mengurangi kemiskinan melalui dua cara yaitu dampak langsung (*its own effect*) dan dampak peningkatan kerja variabel lainnya (*the trough-effect*). Dampak langsung dapat dilihat ketika adanya pembangunan jalan sedang berlangsung yaitu dengan adanya penambahan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar sehingga dapat menambah pendapatan penduduk dengan adanya pembangunan jalan tersebut. Dampak tidak langsung dapat dilihat dari manfaat jalan guna meningkatkan kinerja pasar input dan pasar barang sehingga dapat meminimalisir biaya produksi. Menurut Sakti (2012), hierarki jalan dapat dibedakan berdasarkan fungsi, status, dan muatan sumbu terberat.

Menurut Sakti (2012) prasarana jalan merupakan infrastruktur yang sangat penting dalam mendukung berkembangnya suatu wilayah yang ditandai dengan lancarnya distribusi pergerakan manusia, barang, dan jasa sehingga perekonomian wilayah lebih maju. Terdapat tiga manfaat utama jalan yaitu:

1. Membuka keterisolasian suatu wilayah atau daerah,
2. Meningkatkan aktivitas dan mendukung kelancaran perekonomian suatu daerah atau wilayah,
3. Mempermudah akses teknologi dan pemanfaatan fasilitas sosial bagi masyarakat.

Terdapat hubungan antara infrastruktur jalan, listrik dan air bersih yang akan di jelaskan di bawah ini.

1. Jalan

Buruknya infrastruktur jalan berakibat pada kerusakan pada kendaraan dan biaya operasi suatu kendaraan. Memperbaiki jalan dapat menurunkan biaya transportasi, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu, jalan juga berpengaruh terhadap pendidikan dan kesehatan. Semakin jauh aksesibilitas menuju sarana tersebut, maka akan mempersulit masyarakat untuk menuju hidup yang lebih sejahtera.

2. Kondisi Jalan

Kondisi jalan dapat digolongkan menjadi kondisi jalan baik, sedang, dan rusak. Menurut Glewwe (2000), infrastruktur jalan memiliki hubungan erat dengan kemiskinan. Kondisi jalan aspal (baik) mempunyai kemungkinan yang lebih tinggi untuk keluar dari kemiskinan. Dengan adanya perbaikan dalam mutu atau kondisi jalan maka akan menghasilkan peningkatan dalam pendapatan masyarakat dan semakin panjang jalan untuk menuju suatu tempat, maka akan mengeluarkan biaya yang makin besar pula untuk membayar biaya perjalanan tersebut.

2.2.2 Air bersih

Menurut Kodatie (2005), air bersih adalah air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan air bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diminum apabila dimasak. Terdapat beberapa sub bab mengenai air bersih yang diantaranya adalah sumber air bersih, kebutuhan air, pengelolaan air bersih, kehilangan air. Penyediaan air bersih dengan akses dan kualitas yang baik akan membuat kemungkinan masyarakat miskin terserang penyakit sehingga dapat memiliki produktivitas dalam bekerja yang lebih tinggi. Ketika masyarakat miskin memiliki akses terhadap air bersih secara berkelanjutan maka akan mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk mencari alternatif sumber air bersih lainnya, biaya tersebut berupa waktu, tenaga dan uang sehingga dapat menyalurkan biaya tersebut untuk kebutuhan lain. Menurut Departemen Kesehatan Tahun 2002, air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.

1. Sumber Air Bersih

Terdapat beberapa sumber air bersih menurut Cipta Karya dan Survey Sumber Daya dan Infrastruktur Desa 2008-2009, diantaranya adalah:

a. Air PDAM

Air PDAM adalah air yang berasal dari system sambungan rumah yang disediakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum. Air PDAM adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air.

b. Himpunan masyarakat pengguna air atau perpipaan adalah air melalui system perpipaan yang dikelola oleh non-PDAM yang langsung masuk ke halaman/rumah konsumen. Pengelolanya adalah masyarakat, konsumen tinggal mengambil air di rumahnya, bisa di luar ataupun di dalam rumah. Sumber air dapat berasal dari mata

air, sungai, danau atau air hujan yang melalui system perpipaan dan tidak harus melalui proses pengolahan.

- c. Sumur gali adalah penyediaan air bersih dengan cara penggalian tanah untuk mendapatkan sumber air dan pengambilannya dengan menggunakan timba.
- d. Sungai (air permukaan) yaitu air diperoleh dengan cara pengambilan langsung ke sungai tanpa sistem perpipaan atau pompa dan tanpa proses penyaringan atau pengolahan.
- e. Mata air adalah sumber air permukaan tanah dimana air timbul dengan sendirinya. Digolongkan berasal dari sumber mata air terlindungi hanya jika sumber air bersih yang digunakan berasal hanya dari mata air tanpa system perpipaan atau pompa dan tanpa melalui proses penyaringan atau pengolahan dimana penduduk harus pergi ke mata air tersebut untuk mendapatkan air bersih.

Menurut Adam (2002), layanan jaringan air bersih adalah bagian penting dari infrastruktur. Pasokan air yang tidak memadai, dapat menghambat pembentukan dan pengembangan suatu usaha, selain itu, kualitas air yang buruk dapat berhubungan dengan kesehatan dan pendidikan yang buruk pula. Menyediakan air bersih yang memadai dapat membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan dapat mengurangi kemiskinan. Selain itu, infrastruktur air merupakan salah satu kriteria masyarakat miskin menurut BPS.

2.2.3 Listrik

Kebutuhan listrik merupakan hal yang dibutuhkan dalam masyarakat. Peningkatan kegiatan perekonomian dalam bidang industri juga membutuhkan listrik yang memadai guna kelancaran proses produksi. Menurut BPS terdapat dua sumber listrik, yaitu:

1. PLN, yaitu sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN
2. Non PLN, yaitu sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi atau pihak lain selain PLN. Termasuk yang menggunakan sumber penerangan berupa aki, generator, pembangkit listrik tenaga surya.

Menurut Balisacan (2002), kurangnya layanan energi (listrik) yang memadai dapat memiliki dampak negatif pada perekonomian dan mempengaruhi produktivitas masyarakat. Dalam hal perdagangan juga membutuhkan listrik untuk tumbuh dan berkembang. Ketika masyarakat pada suatu wilayah tidak memiliki akses sama sekali terhadap listrik ataupun memiliki akses namun tidak dapat menikmati dengan baik akan sangat mempengaruhi produktivitas dan kreativitas masyarakat sehingga mempengaruhi perekonomian. Listrik mencerminkan akses ke teknologi dan memberikan

kontribusi langsung terhadap peningkatan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat miskin serta pengurangan terhadap kemiskinan.

2.3 Kesehatan

Kesehatan merupakan aspek yang sangat penting untuk melihat tingkat kemiskinan suatu wilayah serta dapat menggambarkan secara umum kondisi perekonomian masyarakat pada suatu wilayah. Kesehatan dan kemiskinan keduanya memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Kesehatan masyarakat sangat mempengaruhi produktivitas, jam kerja, kemampuan, dan produktivitas masyarakat dalam bekerja. Produktivitas dan kreativitas mempengaruhi penghasilan masyarakat dan tingkat kemiskinan lingkungan tersebut. Sebaliknya, kemiskinan menyebabkan masyarakat disuatu wilayah tidak memiliki kesempatan hidup yang layak dan tidak ada jaminan kesehatan. Kesehatan masyarakat merupakan sebuah investasi untuk perkembangan suatu wilayah.

Berdasarkan BPS-RI (2011), indikator kesehatan terbagi atas :

1. Kesehatan balita

Kesehatan balita dipengaruhi beberapa parameter yaitu penolong kelahiran, angka kematian, status gizi dan imunisasi. Penolong kelahiran dibedakan atas tenaga kesehatan dan selain tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan diasumsikan lebih baik dibanding selain tenaga kesehatan karena dapat mengurangi resiko kematian ibu dan bayi. Angka kematian bayi digunakan untuk menggambarkan kesehatan bayi mulai lahir sampai dengan usia 11 bulan. Angka ini menunjukkan banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran.

2. Fasilitas

Fasilitas kesehatan dihitung berdasarkan jumlah dan sebaran fasilitas dan jumlah, ratio, dan sebaran tenaga kesehatan. Fasilitas kesehatan berupa posyandu dan puskesmas. Tenaga kesehatan berupa dokter, perawat dan bidan.

2.4 Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting yang mempengaruhi perkembangan perekonomian suatu wilayah. Ketika penduduk di suatu wilayah memiliki tingkat pendidikan yang baik maka secara otomatis memiliki ketrampilan yang baik dan penghasilan yang baik pula, sehingga perkembangan perekonomian pun akan positif. Pendidikan diartikan sebagai pintu gerbang untuk keluar dari kemiskinan, karena sebagian

berdasarkan hasil penelitian, diketahui jika sebagian besar masyarakat miskin tidak memiliki background pendidikan yang baik, tidak lulus SD dan buta huruf.

Indikator pendidikan berdasarkan Susenas 2010. Pendidikan dibagi dalam dua jenis, yaitu:

1. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SMA/MA/ sederajat dan Perguruan Tinggi.
2. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus), pendidikan anak usia dini (PAUD) atau pra-sekolah, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B, dan paket C) serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Terdapat delapan indikator kunci dalam pencapaian standar nasional pendidikan diantaranya sarana dan prasarana pendidikan serta pendidik dan tenaga pendidik.

1. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sekolah harus memenuhi standar terkait dengan pengukuran ruangan, jumlah, dan lainnya. Sekolah memenuhi standar terkait dengan jumlah peserta didik dalam rombongan belajar. Sekolah memiliki standar terkait penyediaan alat dan sumber belajar.

2. Pendidikan dan tenaga pendidik

Pendidik dan tenaga pendidik memiliki standar rasio terhadap jumlah murid dan dengan kualifikasi yang telah distandarkan. Spesifikasi dari penilaian pendidik dan tenaga pendidik yaitu kualifikasi, kompetensi, kompetensi manajerial, kualifikasi akademik, standar kompetensi guru kelas, standar kompetensi guru mata pelajaran.

2.5 Kedekatan Pasar

Pasar adalah salah satu dari berbagai system, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang. Kedekatan dengan pasar akan dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan aktivitas perekonomian, untuk menjual hasil pertanian, dan membeli bahan pangan. Semakin dekat dengan pasar maka akan semakin memudahkan masyarakat untuk

melakukan aktivitas jual beli sehingga kebutuhan pokoknya dapat terpenuhi, semakin mudah memperoleh uang sehingga perekonomian akan semakin baik. Namun jika masyarakat pada suatu wilayah memiliki akses yang jauh terhadap pasar, maka akan menghambat aktivitas perekonomian dan memerlukan biaya yang lebih besar untuk menjual hasil pertanian sehingga berdampak terhadap kemiskinan. Kedekatan dengan pasar juga akan dapat membuat masyarakat lebih kreatif, dan mengembangkan produknya untuk mendapatkan nilai tambah. Pasar dapat dibedakan menurut luas jangkauan yaitu:

1. Pasar lokal

Pasar lokal adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu kota tempat produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar lokal melayani permintaan dan penawaran dalam satu kota.

2. Pasar nasional

Pasar nasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dalam satu negara tempat produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar nasional melayani permintaan dan penjualan dari dalam negeri.

3. Pasar internasional

Pasar internasional adalah pasar yang membeli dan menjual produk dari beberapa negara. Bisa juga dikatakan luas jangkauannya di seluruh dunia.

2.6 Kondisi Sosial

Secara mendasar, penyebab kemiskinan disebabkan baik oleh faktor fisik maupun sosial. Faktor fisik dalam salah satu bentuknya bisa berwujud ketersediaan infrastruktur, dimana kelengkapan ketersediaan infrastruktur akan semakin memudahkan masyarakat untuk mampu mewujudkan keberhasilan pengentasan kemiskinan. Sementara itu, faktor sosial atau dengan kata lain kondisi sosial dalam bentuk yang lebih abstrak juga merupakan faktor kunci terhadap keberhasilan program pengentasan kemiskinan.

Kondisi sosial pada penelitian ini lebih memfokuskan pada ikatan sosial sebagai salah satu bentuk modal sosial berupa norma-norma dan jaringan-jaringan yang bisa memampukan orang untuk bertindak secara kolektif (Woolcock dan Narayan, 2006). Dalam terminologi tindakan komunitas, Kerry et.al (2006) dan Putnam (1993; 2000) menyatakan bahwa sebuah masyarakat yang terkoneksi dengan baik (semisal suatu modal sosial masyarakat) akan mempunyai kemampuan lebih bagus dalam memobilisasi sumber daya local dan extra-local pada suatu tindakan secara efektif, dimana ide ini mendapat

dukungan secara empiris. Ikatan sosial yang digunakan pada penelitian ini adalah *Rate of Participation* dan Densitas.

Selanjutnya dalam penelitian ini akan menyelidiki lebih lanjut kondisi sosial masyarakat miskin Kecamatan Poncokusumo melalui persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat merupakan suatu konsep dengan maksud mengembangkan daerah tertentu dengan berdasarkan pada ciri khusus atau jati diri yang dimiliki oleh daerah tersebut. (Barth, 1969 dalam Ichtiarto (2006:28)). Persepsi masyarakat sebagai cermin seberapa besar harapan peluang hidup ada pada wilayah disekitar mereka. Persepsi masyarakat wilayah studi akan dicoba direfleksikan dari potret masyarakat meliputi 1) seberapa indah dan nyaman tempat tinggal mereka; 2) seberapa besar kecukupan ketersediaan bahan pangan di wilayah tempat mereka tinggal, dan 3) seberapa besar tingkat kepedulian penduduk terhadap kesejahteraan masyarakat.

Persepsi terkait keindahan dan kenyamanan lingkungan dapat menginterpretasikan perasaan masyarakat terkait dengan lingkungannya, apakah lingkungan tempat tinggalnya sudah indah dan nyaman. Ketika masyarakat merasa lingkungan tempat tinggalnya tidak indah dan nyaman, menandakan terdapat permasalahan dilingkungannya yang dapat mengakibatkan masyarakat malas berpartisipasi dilingkungannya dan membuat modal sosial untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di lingkungannya lemah. Keindahan dan kenyamanan pada penelitian ini didefinisikan dengan pertanyaan terkait perasaan bangga untuk tinggal dilingkungan tempat tinggal sekarang, sifat dan sistem dalam lingkungan tempat tinggal, kesehatan dan kebersihan lingkungan serta ada atau tidak rencana untuk pindah dari lingkungan tempat tinggal saat ini.

Persepsi terkait ketersediaan bahan pangan dilingkungan tempat tinggal dapat menginterpretasikan ketersediaan dan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan bahan pangan dilingkungannya. Kecukupan bahan pangan tersebut didefinisikan dengan pertanyaan terkait persepsi masyarakat terhadap kecukupan bahan pangan, melalui sulit ataukah susah untuk membeli bahan pangan. Ketika masyarakat merasa ketersediaan bahan pangan dilingkungannya tidak cukup, menandakan terdapat permasalahan seperti akses, daya beli, dan ekonomi masyarakat. Ketersediaan bahan pangan yang rendah akan membuat masyarakat malas berpartisipasi, dan dapat membuat ketimpangan dengan lingkungan lain yang memiliki ketersediaan bahan pangan yang baik.

Persepsi terkait kepedulian terhadap tetangga di lingkungan tempat tinggal dapat menggambarkan kepedulian masyarakat terhadap tetangga dilingkungannya. Pada penelitian ini, tingkat kepedulian terhadap kesejahteraan di lingkungan tempat tinggal

dapat dilihat melalui Persepsi masyarakat terkait dengan kepedulian terhadap tetangga di lingkungan tempat tinggalnya. Kepedulian terhadap tetangga tersebut didefinisikan dengan pertanyaan terkait kepentingan untuk berpartisipasi dalam lingkungan, mendengarkan keluhan tetangga, peduli terhadap tetangga yang sepuh, saling menjaga tetangga dan anak-anak serta kepentingan berkomunikasi dan keberadaan tetangga. Pada persepsi masyarakat yang ditekankan adalah jawaban masyarakat terkait dengan hal tersebut. Semakin tinggi kepedulian terhadap tetangga menandakan semakin tinggi tingkat partisipasi, sikap saling menjaga dan modal sosial masyarakat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di lingkungannya.

Kondisi sosial akan membentuk asumsi bahwa semakin tinggi ikatan sosial diantara masyarakat dan semakin tinggi persepsi masyarakat terhadap lingkungan tempat tinggal merupakan nilai positif yang mendorong masyarakat untuk mempunyai persepsi positif terhadap diri dan lingkungan.

2.7 Poverty Indicator

Poverty line atau garis kemiskinan adalah pengeluaran minimum yang diperlukan oleh seorang individu untuk memenuhi makanan pokok nya dan kebutuhan selain makanan (World Bank Institute, 2005). Garis kemiskinan juga mendefinisikan tingkat konsumsi atau pendapatan yang diperlukan dalam suatu rumah tangga untuk keluar dari angka kemiskinan. Diperlukan adanya kesepakatan yang tetap untuk membedakan antara miskin dan tidak miskin. Terdapat empat indeks yang digunakan dalam mengetahui garis kemiskinan yaitu *Headcount Index*, *Poverty Gap Index*, *Poverty Saverity Index*, dan *Human Poverty Index*.

Persamaan yang digunakan dalam poverty indicator adalah persamaan untuk negara berkembang. Perhitungan *Human Poverty Index* berbeda pendekatannya antara negara berkembang dan negara maju. Untuk perhitungan indeks bagi negara maju memasukan faktor pengangguran dalam perhitungan.

2.7.1 Headcount Index

Headcount Index merupakan indeks kemiskinan yang paling luas penggunaannya, yaitu jumlah penduduk miskin terhadap total penduduk yang terdapat di kawasan tersebut. *Headcount Index* merupakan bagian dari penduduk yang memiliki pendapatan ataupun konsumsi dibawah garis kemiskinan. Kekurangan dari metode ini adalah tidak bisa menggambarkan kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan.

2.7.2 *Poverty Gap Index*

Poverty Gap Index merupakan kedalaman atau jurang kemiskinan yang bermanfaat untuk mengetahui seberapa banyak sumber daya (uang) yang dibutuhkan untuk mengentaskan kemiskinan melalui transfer uang (*cash transfer*) yang ditujukan kepada orang miskin dengan sempurna. Semakin tinggi nilai indeks ini semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan atau dengan kata lain yaitu nilai indeks menunjukkan kehidupan perekonomian penduduk miskin yang semakin terpuruk.

Indeks ini dapat mengetahui pendapatan agregat rata-rata atau kekurangan pada konsumsi relatif terhadap garis kemiskinan di seluruh populasi. *Poverty Gap Index* memperkirakan kedalaman kemiskinan dengan mempertimbangkan seberapa jauh, rata-rata, orang miskin dari garis kemiskinan. Selain itu merupakan ukuran peningkatan pendapatan rata-rata yang diperlukan untuk membawa orang-orang miskin di negara keluar dari kemiskinan yang ekstrim.

2.7.3 *Poverty Saverity Index*

Poverty Saverity Index merupakan ukuran yang menggambarkan keparahan kemiskinan. Indeks ini menggambarkan ketimpangan diantara orang miskin, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin juga semakin tinggi.

Ukuran ini memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya (*poverty gap*) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.

2.7.4 *Human Poverty Index*

Human Poverty Index memperkenalkan cara baru untuk mengukur pembangunan dengan menggabungkan indikator harapan hidup, pencapaian pendidikan dan penghasilan ke dalam indeks pembangunan manusia komposit, IPM. Terobosan untuk IPM adalah penciptaan statistik tunggal yang berfungsi sebagai kerangka acuan untuk pembangunan baik sosial dan ekonomi. HPI menetapkan minimum dan maksimum untuk setiap dimensi, yang disebut tiang gawang, dan kemudian menunjukkan di mana masing-masing negara

berdiri dalam kaitannya dengan tiang gawang tersebut, dinyatakan sebagai nilai antara 0 dan 1.

2.8 Spatial Multiple Regression

Menurut Anselin (2004), analisis spasial mengarah pada berbagai macam operasi dan konsep termasuk pada perhitungansederhana, klasifikasi, penataan, tumpang susun geometris, serta permodelan kartografis. Analisis spasial merupakan prosedur kuantitatif yang dapat digunakan pada analisis lokasi. Salah satu perangkat yang digunakan untuk analisis spasial adalah Geoda. Geoda dapat dikelompokkan menjadi enam kategori yang diantaranya adalah:

1. Manipulasi data spasial dan utilitas;
2. Transformasi data melalui transformasi variabel dan variabel;
3. Pemetaan dan animasi peta;
4. Grafik statistik;
5. Autokorelasi spasial; dan
6. Regresi spasial.

Geoda dapat digunakan untuk menggabungkan antara peta dengan grafik statistika dan dapat menganalisis data spasial.

Terdapat tahapan dalam pembentukan model regresi spasial yang terdiri dari:

1. Menetapkan wilayah studi, variabel terikat dan variabel bebas,
2. Memodelkan dengan metode regresi linier klasik atau metode Ordinary Least Square (OLS)
3. Mencari model OLS terbaik dengan metode backward, sehingga didapatkan model yang tepat dan terbebas dari multikolinearitas. Metode backward dilakukan dengan mencari nilai *probability* yang signifikan, yaitu $<0,05$. Menguji asumsi model regresi klasik bahwa residual bersifat IIDN (Identik, Independen, Distribusi Normal)
4. Menguji apakah ada depedensi spasial digunakan metode Lagrange Multiplier Test
5. Identifikasi awal model spasial yang agak digunakan melihat LM-test, berdasarkan atas informasi dari LM-test yang dilakukan permodelan spasial, berdasarkan parameter yang signifikan.
6. Melakukan permodelan dan pemilihan model terbaik.

2.8.1 Model Regresi Spasial

Menurut Anselin (2004), model regresi spasial merupakan model spasial yang melibatkan adanya pengaruh spasial. Model umum regresi spasial terdapat dalam dua bentuk matriks yang berhubungan dengan adanya unsur autokorelasi spasial dengan adanya parameter yang berupa spasial autoregresif dan *moving average*.

2.8.2 Uji Classic

Pada uji *classic* hal yang perlu diperhatikan yaitu nilai *probability* yang signifikan dalam penelitian ini yaitu $< 0,05$. Jika nilai probabilitas $< 0,05$ yaitu dapat dikatakan terdapat pengaruh antara variabel terikat dengan variabel bebas. Pertimbangan penggunaan angka signifikan 0,05 yaitu, tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 95%.

2.8.3 Spatial Lag Model

Spatial lag model disebut juga *spatial autoregressive model* adalah salah satu model spasial dengan pendekatan area dengan memperhitungkan pengaruh spasial lag pada variabel dependen saja. Terdapat pengujian hipotesis pada *Lagrange Multiplier* yaitu:

- a. $H_0 : \rho = 0$ (tidak ada dependensi lag spasial)
- b. $H_1 : \rho \neq 0$ (ada dependensi lag spasial)

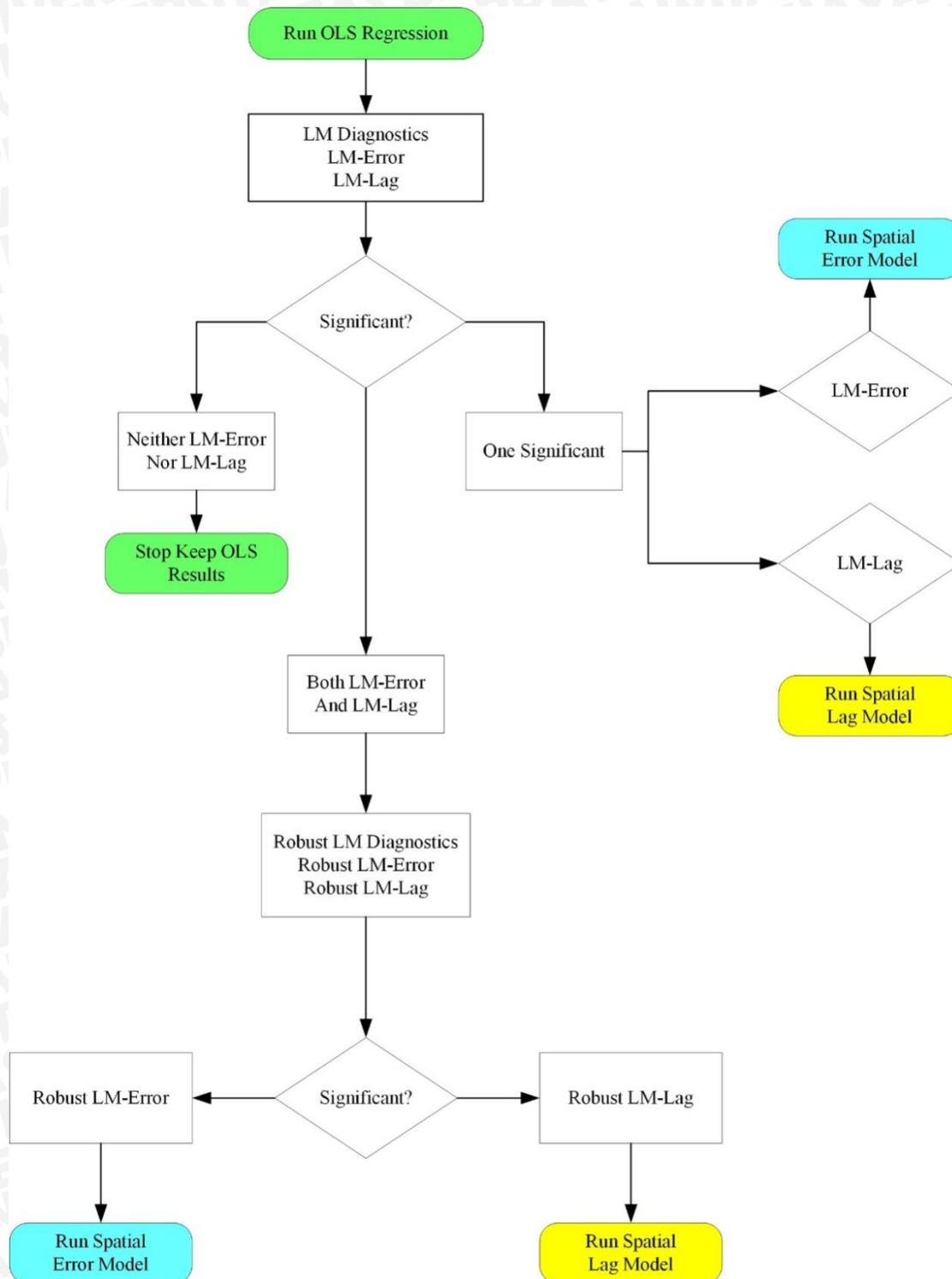
Ketika permodelan termasuk dalam *spatial lag* maka vektor yang digunakan adalah u atau vektor yang dimiliki berkorelasi antar lokasi pengamatan.

2.8.4 Spatial Error Model

Spatial error model adalah salah satu model spasial dengan mendiagnosa fenomena dependensi/keterkaitan error antar wilayah. Hipotesis pada *Lagrange Multiplier* yaitu:

- a. $H_0 : \lambda = 0$ (tidak ada dependensi spasial error)
- b. $H_1 : \lambda \neq 0$ (ada dependensi spasial error)

Ketika permodelan termasuk dalam *spatial error* maka vektor yang digunakan adalah ε atau vektor yang dimiliki berkorelasi berdistribusi normal, spasial error terjadi akibat adanya dependensi nilai error pada suatu lokasi berhubungan dengan nilai error di lokasi pengamatan lain. Berikut merupakan alur proses regresi spasial menggunakan Geoda.



Gambar 2. 2 Alur Analisis Spasial Regresi

Sumber : Ansellin

Analisis spasial regresi dimulai dengan melakukan uji model klasik lalu dilihat nilai signifikan antara LM-Lag dan LM-Error yang dapat dilihat dari nilai probabilitas di bawah 0,05. Jika nilai tidak signifikan pada kedua nilai probabilitas LM-Lag dan LM-Error maka permodelan menggunakan permodelan klasik. Jika nilai signifikan pada LM-Lag maka di

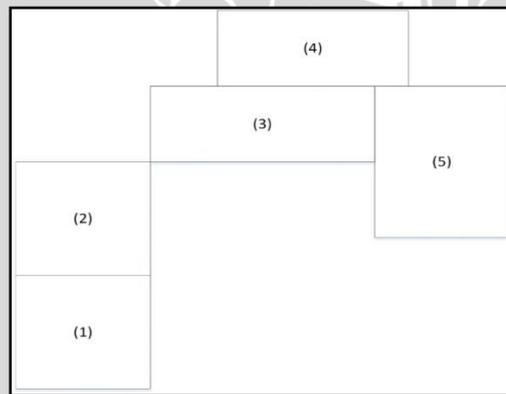
lanjutan pada spatial lag model dan jika signifikan pada LM-Error maka di lanjutkan pada spatial error model. Jika nilai probabilitas LM-Lag dan LM-Error signifikan, maka dilanjutkan dengan melihat nilai Robust LM-Lag dan Robust LM-Error. Sama dengan LM-Lag, jika nilai Robust LM-Lag signifikan maka dilanjutkan pada spatial lag model dan jika nilai Robust LM-Error signifikan maka dilanjutkan pada spatial error model. Jika kedua nilai LM-Lag dan LM-Error signifikan namun tidak ada nilai Robust yang signifikan, maka akan di gunakan nilai probabilitas LM-Lag karena LM-Lag uji identifikasi model sesuai dengan dependensi lag ataupun error.

2.8.5 Bobot Spasial

Bobot spasial merupakan jumlah *polygon* yang menjadi tetangga terdekat dengan *polygon* yang akan diteliti. Bentuk umum matriks spasial (W) adalah:

$$W = \begin{pmatrix} W_{11} & \dots & W_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ W_{n1} & \dots & W_{nn} \end{pmatrix}$$

Matriks W berdasarkan atas persentuhan batas wilayah (*contiguity*) menyatakan bahwa interaksi spasial terjadi antar wilayah yang bertetangga, yaitu interaksi yang memiliki persentuhan batas wilayah. Terdapat tipe matrik ketergantungan spasial antar region yang digambarkan pada gambar 2.2



Gambar 2. 3 Ilustrasi Persentuhan Batas Wilayah

Terdapat tipe matriks ketergantungan spasial atau persinggungan antar region menurut James P. Lesage (1999) yaitu:

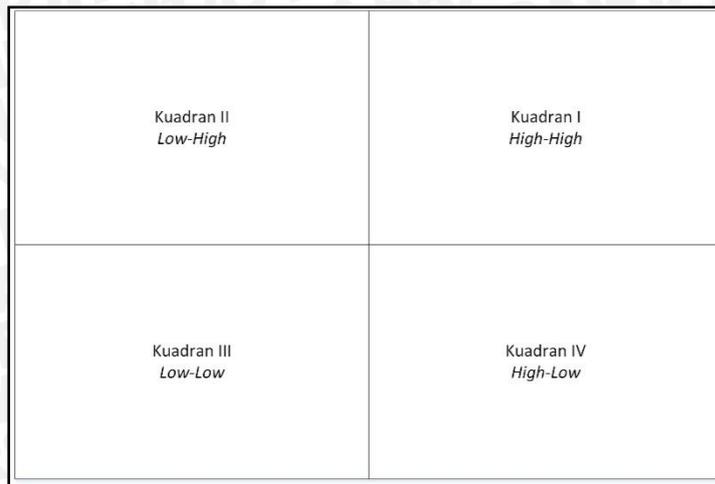
- Line Contiguity* (persinggungan tepi), dengan $W_{ij} = 1$ digunakan untuk wilayah yang bersinggungan langsung dari sisi kanan maupun sisi kiri dari wilayah yang diteliti. Sebagai contoh, pada gambar 2.2, wilayah 3 bersinggungan tepi dengan wilayah 5, sehingga $W_{35} = 1$ dan yang lain 0.

- b. *Rook Contiguity* (persinggungan sisi), dengan $W_{ij} = 1$ digunakan untuk wilayah yang mempunyai sisi bersinggungan langsung dengan wilayah yang diteliti. Sebagai contoh, pada gambar 2.2, wilayah 1 bersinggungan langsung dengan wilayah 2, sehingga $W_{12} = 1$, $W_{34} = 1$, $W_{35} = 1$ dan yang lain 0.
- c. *Bishop Contiguity* (persinggungan sudut) dengan $W_{ij} = 1$ digunakan untuk wilayah yang mempunyai sudut yang bersinggungan langsung dengan wilayah yang diteliti. Sebagai contoh pada gambar 2.2, wilayah 2 bersinggungan sudut dengan wilayah 3 sehingga $W_{23} = 1$ dan yang lain 0 karena tidak terdapat sudut yang bersinggungan antar wilayah.
- d. *Queen Contiguity* (persinggungan sisi sudut), dengan $W_{ij} = 1$ digunakan untuk wilayah yang memiliki sisi atau sudut yang bersinggungan dengan wilayah yang diteliti. *Queen contiguity* merupakan gabungan dari *rook contiguity* dan *bishop contiguity*. Sebagai contoh, pada gambar 2.2, $W_{12} = 1$, $W_{32} = 1$, $W_{35} = 1$ dan yang lain 0.

2.9 Analisis Moran's I dan Local Indicator of Spatial Association (LISA)

Analisis *Moran's I* dan *Local Indicator of Spatial Association* (LISA) di gunakan pada GeoDa (*Geographic Data Analysis*). GeoDa digunakan untuk analisis data secara spasial. Pada Analisis Moran's I, merupakan analisis dengan ukuran dari korelasi atau hubungan antara pengamatan yang saling berdekatan. Analisis ini membandingkan nilai pengamatan di suatu daerah dengan nilai pengamatan di daerah lain. Nilai Moran's I merupakan standar statistik untuk menentukan autokorelasi spasial yang dapat menentukan jumlah pengelompokkan berdasarkan variabel. Nilai Moran's I semakin mendekati 1 maka semakin kuat korelasi spasialnya. Nilai autokorelasi spasial dikatakan kuat jika nilai pada pengelompokan *high-high* atau nilai *low-low* dari sebuah variabel yang berkelompok dengan daerah yang bertetangga. Koefisien Moran's I yang digunakan untuk uji dependensi spasial atau autokorelasi antar lokasi, hipotesis yang digunakan yaitu:

- a. H_0 : $\rho = 0$ (tidak ada autokorelasi antar lokasi)
- b. H_1 : $\rho \neq 0$ (ada autokorelasi antar lokasi)



Gambar 2. 4 Kuadran Nilai Moran's I

Kuadran I yaitu *High-High* yang menunjukkan nilai observasi tinggi yang dikelilingi oleh daerah yang mempunyai nilai observasi yang tinggi juga. Kuadran II yaitu *Low-High* menunjukkan nilai observasi rendah yang dikelilingi oleh daerah yang mempunyai nilai observasi tinggi. Kuadran III yaitu *Low-Low* yang menunjukkan nilai observasi rendah dikelilingi oleh daerah yang mempunyai nilai observasi rendah dikelilingi oleh daerah yang mempunyai nilai observasi rendah. Kuadran IV yaitu *High-Low* menunjukkan nilai observasi tinggi dikelilingi oleh daerah yang mempunyai nilai observasi rendah.

Analisis *Local Indicator of Spatial Association* (LISA) dapat menunjukkan pengelompokan cluster spasial dengan nilai yang signifikan. Pada LISA akan menghasilkan peta dengan 6 kategori, yaitu *not significant*, *high-high*, *high-low*, *low-low*, *low-high*, *neighborless*. Pada kategori *high-high* merupakan desa dengan pengelompokan nilai tinggi dan berdekatan dengan desa yang memiliki nilai tinggi juga dengan adanya pengaruh spasial.

2.10 Social Network Analysis

SNA didefinisikan sebagai pemetaan dan pengukuran hubungan dan interaksi dalam sebuah kesatuan lembaga lokal yang melibatkan orang, kelompok masyarakat, informasi, dan beragam pelayanan sosial didalamnya. Sosial network adalah studi terhadap entitas sosial (misalnya peran seseorang dalam suatu organisasi) dan interaksi serta relasi antar entitas tersebut.

Wasserman dan Faust (2009), mendefinisikan jaringan sosial sebagai perspektif hubungan sosial masyarakat yang meliputi teori, model, dan aplikasi yang dinyatakan dalam konsep relasional. Artinya, jaringan sosial didefinisikan oleh hubungan antara unit-

unit dalam sebuah komponen dasar berupa jaringan dengan empat prinsip SNA sebagai berikut:

1. Aktor dan tindakannya dipandang sebagai hubungan yang saling tergantung satu sama lainnya dan tidak bersifat independen. Tindakan yang dilakukan responden dalam sebuah jaringan dianggap sebagai hubungan interpersonal antar responden yang akan berdampak satu dengan lainnya.
2. Hubungan relasional antar aktor adalah jaringan untuk mentransfer sumber daya (baik material ataupun non material). Jaringan koneksi merupakan modal sosial, dan jaringan yang bersifat kaya dan terstruktur dengan baik dapat memberikan tingkat modal sosial yang tinggi untuk aktor dalam diri mereka.
3. Modal jaringan berfokus pada individu yang melihat lingkungan jaringan struktural sehingga dapat memberikan kesempatan untuk berbagai permasalahan pada tindakan yang terjadi pada individu.
4. Modal jaringan sosial menggambarkan struktur sosial (sosial, ekonomi, politik, dsb) sebagai pola yang terbentuk dari hubungan antar aktor.

Pengukuran SNA dilakukan dengan 4 pendekatan yaitu tingkat partisipasi, density dan centrality. Penjelasan dari masing – masing pendekatan adalah sebagai berikut.

A. Tingkat partisipasi

Tingkat partisipasi (*Rate of Participation*) dihitung untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dapat dihitung menggunakan rumus Fraus (2009) sebagai berikut.

$$\bar{a}_{i+} = \frac{\sum_{i=1}^g \sum_{j=1}^h a_{ij}}{g} = \frac{a_{++}}{g} = \frac{\sum_{i=1}^g x_{ij}^N}{g}$$

Keterangan:

g = node/responden

h = jumlah kelembagaan

x_{ij}^N = matrix primer dari responden i hingga j

B. Konsep Density

Densitas digunakan untuk mengetahui kerapatan dari hubungan responden dalam satu satuan wilayah. Menurut Wasserman dan Faust (2009) nilai densitas dalam suatu hubungan antar responden dimasyarakat dapat diinterpretasikan sebagai jumlah rata-rata aktivitas yang terjadi oleh setiap pasang aktor. Nilai densitas dapat digunakan untuk melihat

seberapa besar proporsi responden yang berbagi keanggotaan dalam setiap kelembagaan. Nilai densitas berkisar antara 0 – 1.

Rumus:

$$\Delta(N) = \frac{\sum_{i=1}^g \sum_{j=1}^g x_{ij}^N}{g(-1)} = \frac{2L}{g(g-1)}; i \neq j$$

Keterangan:

$\Delta(N)$ = nilai densitas/kerapatan hubungan

g = node/responden yang mempunyai jaringan afiliasi dengan responden lainnya

$g(-1)$ = node/responden yang terisolasi

x_{ij}^N = matrix primer dari responden i hingga j

L = jumlah garis yang menghubungkan responden

2.11 Pariwisata

Menurut Undang Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Pasal 1, Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pengertian tersebut meliputi: semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata, sebelum dan selama dalam perjalanan dan kembali ke tempat asal, pengusaha daya tarik atau atraksi wisata (pemandangan alam, taman rekreasi, peninggalan sejarah, pagelaran seni budaya). Usaha dan sarana wisata berupa: usaha jasa, biro perjalanan, pramu wisata, usaha sarana, akomodasi dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan pariwisata. Sedangkan pengertian secara umum pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan meninggalkan tempat semula dan dengan suatu perencanaan atau bukan maksud mencari nafkah ditempat yang dikunjunginya, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan atau rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

2.11.1 Jenis Pariwisata

Host and Guest (1989) dalam Kusumanegara (2009:3) mengklasifikasikan jenis pariwisata sebagai berikut:

1. Pariwisata Etnik (*Ethnic Tourism*), yaitu perjalanan untuk mengamati perwujudan kebudayaan dan gaya hidup masyarakat yang menarik.
2. Pariwisata Budaya (*Culture Tourism*), yaitu perjalanan untuk meresapi atau untuk mengalami gaya hidup yang telah hilang dari ingatan manusia.
3. Pariwisata Rekreasi (*Recreation Tourism*), yaitu kegiatan pariwisata yang berkisar pada olahraga, menghilangkan ketegangan dan melakukan kontak social dengan suasana santai.
4. Pariwisata Alam (*Eco Tourism*), yaitu perjalanan kesuatu tempat yang relative masih asli atau belum tercemar, dengan tujuan untuk mempelajari, mengagumi, menikmati pemandangan, tumbuhan, dan binatang liar serta perwujudan budaya yang ada atau pernah ada di tempat tersebut.
5. Pariwisata Kota (*City Tourism*), yaitu perjalanan dalam suatu kota untuk menikmati pemandangan, tumbuhan dan binatang liar serta perwujudan budaya yang ada atau pernah ada di tempat tersebut.
6. *Rersort City*, yaitu kota atau perkampungan yang mempunyai tumpuan kehidupan pada persediaan sarana atau prasarana wisata yaitu penginapan, restoran, olahraga, hiburan dan persediaan tamasya lainnya.
7. Pariwisata Agro (*Agro Tourism* yang terdiri dari *Rural Tourism* atau *Farm Tourism*) yaitu merupakan perjalanan untuk meresapi dan mempelajari kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan. Jenis wisata ini bertujuan mengajak wisatawan memikirikan alam dan kelestariannya

2.11.2 Komponen Pariwisata

Komponen pariwisata menurut Inskeep (1991) komponen pariwisata terdiri dari enam kelompok yaitu :

1. Atraksi dan kegiatan-kegiatan wisata yang merupakan semua hal tentang kegiatan wisata yang dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi obyek wisata seperti keunikan dari suatu obyek wisata.
2. Akomodasi merupakan semua hal yang berhubungan dengan fasilitas pendukung dalam pelayanan untuk wisatawan untuk dapat bermalam dalam rangkaian kegiatan wisata.
3. Fasilitas dan pelayanan wisata merupakan semua fasilitas yang dibutuhkan dalam perencanaan suatu kawasan wisata.

4. Fasilitas dan pelayanan transportasi merupakan fasilitas transportasi yang memudahkan wisatawan untuk mengakses obyek wisata.
5. Infrastruktur lain seperti penyediaan infrastruktur pelengkap kegiatan pariwisata misalnya, air bersih, listrik, drainase, telekomunikasi dan lain-lain.
6. Elemen kelembagaan merupakan jenis kelembagaan yang diperlukan dalam membangun dan mengelola kegiatan wisata.

Komponen wisata menurut Mc.Intosh (1995) menyebutkan bahwa komponen pariwisata di kelompokkan dalam empat kelompok yaitu :

1. Sumber daya alam yang meliputi Iklim, bentuk alam, flora dan fauna, sungai, pemandangan alam dan lain-lain.
2. Infrastruktur yang meliputi jaringan air bersih, listrik dan telekomunikasi, jalan, terminal, hotel, restoran, dan lain-lain.
3. Transportasi yang meliputi kereta api, bus, pesawat terbang dan fasilitas transportasi lainnya.
4. Keramahtamahan dan budaya setempat dalam menerima wisatawan.

2.11.3 Kemiskinan, Pariwisata, Kondisi Sosial dan Infrastruktur

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, pariwisata mendapat penugasan baru untuk turut mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan memulihkan citra Indonesia di dunia internasional. Maka pembangunan ekonomi daerah memprioritaskan pembangunan dan penguatan sektor-sektor di bidang ekonomi dengan mengembangkan, meningkatkan dan mendayagunakan sumberdaya yang ada secara optimal. Pariwisata secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Dampak yang ditimbulkan berkaitan dengan sosial, budaya, ekonomi, politik dan pertahanan keamanan. Pariwisata akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan dan pendapatan masyarakat untuk melakukan perjalanan pariwisata. Pengembangan pariwisata banyak mendatangkan manfaat ekonomi, tetapi jika tidak direncanakan dengan baik, akan menimbulkan dampak yang cukup banyak. Dampak ekonomi yang dimaksud adalah:

1. Pekerjaan yang diciptakan melalui pariwisata mungkin rendah bayarannya dan memerlukan sedikit keterampilan.
2. Peningkatan harga mungkin merupakan hasil dari bisnis lokal mencoba meningkatkan keuntungan atau menutupi biaya karyawan tambahan.

3. Nilai properti meningkat, ini terjadi jika masyarakat menjadi “ hot spot” seorang turis. Hal ini akan mengakibatkan pajak properti yang lebih tinggi yang mungkin kurang baik untuk penduduk lokal.
4. Jika pariwisata musiman di tempat tujuan, jadi juga akan injeksi pendapatan ke masyarakat.
5. Penyediaan layanan kesehatan dan layanan polisi bisa meningkat selama musim wisata dengan mengorbankan basis pajak daerah.
6. Keterjangkauan dan ketersediaan perumahan staf bisa menimbulkan masalah.

Disamping itu juga dampak pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal dapat dikategorikan menjadi delapan kelompok besar (Cohen,1984) yaitu :

1. Dampak terhadap penerimaan devisa,
2. Dampak terhadap pendapatan masyarakat,
3. Dampak terhadap kesempatan kerja,
4. Dampak terhadap harga-harga,
5. Dampak terhadap distribusi manfaat/keuntungan,
6. Dampak terhadap kepemilikan dan kontrol,
7. Dampak terhadap pembangunan pada umumnya, dan
8. Dampak terhadap pendapatan pemerintah.

Disamping itu juga permasalahan pariwisata yang muncul kepermukaan, yakni rendahnya kualitas pelayanan pariwisata, rendahnya jumlah nilai dan investasi, ketidaksiapan sarana dan prasarana destinasi, perusakan lingkungan, keamanan, kebersihan dan ketertiban destinasi, masyarakat tidak siap menjadi destinasi wisata, lemahnya koordinasi, peran serta pelaku usaha tidak sinkron dan tidak harmonis, citra destinasi yang negatif, aksesibilitas, iklim usaha tidak kondusif, dan konektivitas.

Dampak-dampak negatif tersebut harus diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan kerugian yang bersifat jangka panjang bagi suatu destinasi pariwisata. Pertama, ketika suatu wilayah tertentu berkembang menjadi destinasi pariwisata, maka permintaan akan produk lokal dan tanah di wilayah tersebut akan meningkat, sehingga harga akan terus meningkat. Kedua, di dalam hasil penelitian the United Nation Economic and Social Commission for Asia and Pacific (UNESCAP) disebutkan bahwa sebagian keuntungan yang dihasilkan dari sektor pariwisata internasional akan kembali ke negara asal wisatawan. Ketiga, kegiatan di sektor pariwisata dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang serius. Keempat, politisasi sektor pariwisata juga dapat terjadi dalam hal-

hal tertentu. Pada umumnya pemerintah di negara maju memiliki posisi tawar (bergaining position) yang sangat tinggi dibandingkan dengan negara berkembang dalam hal menetapkan kebijakan lalu lintas warga negaranya ke luar negeri. Kelima, sektor pariwisata dapat menimbulkan benturan ditinjau dari aspek sosial dan budaya. (M.L. Narasaiah).

Dengan pentingnya peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara, pariwisata dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara, pariwisata sering disebut sebagai *passport to development, new kind of sugar, tool for regional development, new kind of sugar, tool for regional development, invisible export, non- polluting industry*, dan sebagainya. (Pitana,2002).

Peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi sudah jelas dari angka-angka statistik yang dikemukakan di atas. Tetapi pariwisata bukan hanya masalah ekonomi, melainkan juga masalah sosial, budaya, politik dan seterusnya. Pariwisata adalah suatu sistem yang multikompleks, dengan berbagai aspek yang saling terkait dan saling mempengaruhi antara sesama. Dalam dasarwasa terakhir, pariwisata telah menjadi sumber penggerak dinamika masyarakat dan menjadi salah satu *prime-mover* dalam perubahan sosial budaya.

Pariwisata memiliki peluang besar menjadi media yang aplikatif dan efektif untuk menanggulangi kemiskinan. Pendekatan pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*) dapat membuka jalan lebih lebar bagi kelompok masyarakat miskin untuk ikut menikmati peluang dan hasil pengembangan pariwisata (Damanik, 2005). Menurut Sunartiningsih (2005), pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai upaya untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuan sendiri sehingga bebas dan mampu untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara mandiri. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk mendorong terciptanya kekuatan dan kemampuan lembaga masyarakat untuk secara mandiri mampu mengelola dirinya sendiri berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri, serta mampu mengatasi tantangan persoalan di masa yang akan datang. Usaha pemberdayaan harus diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif dan tidak hanya sekedar menciptakan iklim dan suasana. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini (Kartasasmita, 1966).

Wisatawan memerlukan alat transportasi baik itu transportasi udara, laut dan darat untuk mencapai daerah wisata yang menjadi tujuannya. Misalnya untuk menuju Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru (TNBTS) melalui Kabupaten Malang, Kecamatan Poncokusumo, wisatawan dapat menggunakan kendaraan pribadi (mobil/ motor), kendaraan umum, dan persewaan mobil jeep. Tersedianya alat transportasi adalah salah satu kunci sukses kelancaran aktivitas pariwisata. Komponen pendukung lainnya adalah infrastruktur yang secara tidak langsung mendukung kelancaran kegiatan pariwisata misalnya : air, jalan, listrik, pelabuhan, bandara, pengolahan limbah dan sampah. Namun, meskipun tidak semua daerah tujuan wisata memiliki komponen pendukung yang baik, suatu daerah tetap bisa menarik wisatawan untuk berkunjung karena ada hal-hal unik yang hanya bisa ditemui atau dilihat di tempat tersebut.

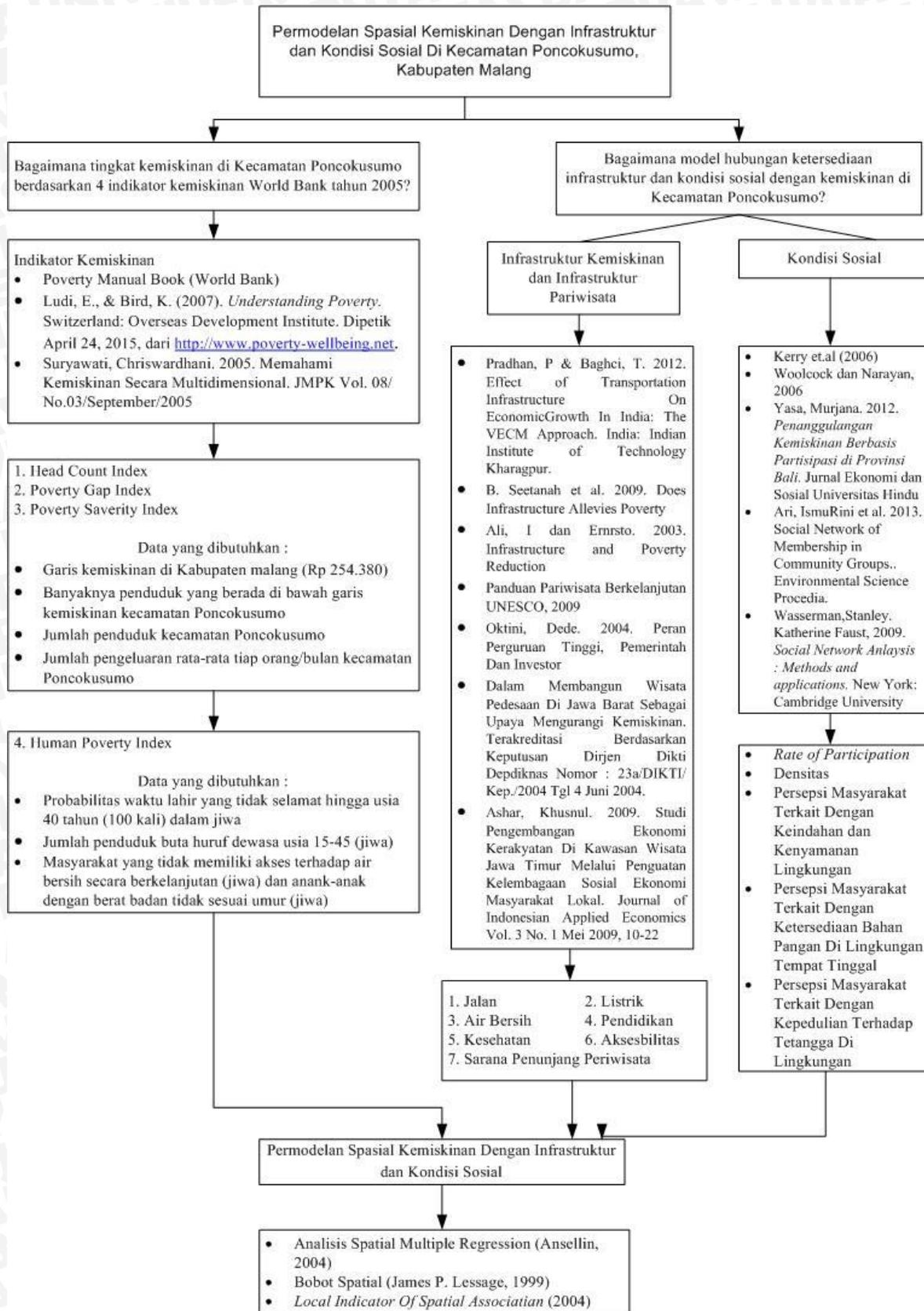
Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, meliputi:

1. Penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api;
2. Penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api; dan
3. Penyediaan dan pengembangan system transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api.

Akomodasi atau tempat menginap adalah tempat dimana wisatawan bermalam untuk sementara di suatu daerah wisata. Sarana akomodasi umumnya dilengkapi dengan sarana untuk makan dan minum. Sarana akomodasi yang membuat wisatawan betah adalah akomodasi yang bersih dengan pelayanan yang baik (ramah, tepat waktu), harga yang pantas sesuai dengan kenyamanan yang diberikan serta lokasi yang relatif mudah di jangkau.

Homestay merupakan jenis akomodasi yang populer di wilayah perkotaan maupun di pedesaan di Indonesia, merupakan tempat tinggal pribadi sebagai tempat wisatawan menginap. Umumnya homestay memberikan pelayanan kamar beserta makanan dan minuman. Salah satu kelebihan home stay adalah wisatawan bisa mendapatkan kesempatan untuk mengenal keluarga pemilik. Mereka bisa juga mengenal lebih jauh tentang alam dan budaya sekitar terutama bila si pemilik rumah memiliki banyak pengetahuan tentang hal tersebut.

2.12 Kerangka Teori



Gambar 2. 5 Kerangka Teori

2.13 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Sumber/Judul	Jenis Publikasi	Tujuan	Variabel	Metode Analisis	Output	Diadopsi dari Penulis	Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu
1	Brenneman, A et al. 2002. <i>Infrastructure & Poverty Linkages</i>	Penelitian. <i>World Bank.</i>	1. Mengetahui hubungan peningkatan pelayanan infrastruktur dengan pengentasan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Energi • Teknologi informasi dan komunikasi • Transportasi • Air dan sanitasi • Kemiskinan 	• Deskriptif evaluatif	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan infrastruktur untuk mengentas kemiskinan • Dampak pertumbuhan ekonomi 	Mengadopsi beberapa variabel untuk dijadikan variabel penelitian (air bersih dan kemiskinan)	Pada penelitian Brenneman menggunakan variabel energi, transportasi dan air bersih terkait dengan kemiskinan, namun pada penelitian ini menggunakan variabel infrastruktur dan kondisi sosial
2.	Usman, dkk. 2002. Analisis Determinan Kemiskinan Sebelum dan Sesudah Desentralisasi Fiskal	Jurnal Publikasi.	1. Menganalisis faktor-faktor determinan kemiskinan sebelum dan sesudah penerapan desentralisasi fiskal.	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik rumah tangga dan individu 	• Model Regresi Logit	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor komunitas infrastruktur yang juga penting adalah akses listrik 	Mengadopsi variabel untuk dijadikan variabel penelitian (listrik dan jalan)	Pada penelitian Usman menggunakan variabel listrik dan jalan terkait dengan kemiskinan, namun pada penelitian ini menggunakan variabel infrastruktur (jalan, air bersih, listrik, pendidikan, kesehatan, jarak pasar, dan sarana penunjang

No	Sumber/Judul	Jenis Publikasi	Tujuan	Variabel	Metode Analisis	Output	Diadopsi dari Penulis	Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu
								pariwisata) dan kondisi sosial
				<ul style="list-style-type: none"> • Faktor komunitas (listrik, transportasi utama melalui darat, jalan dapat dilalui kendaraan bermotor, lembaga keuangan, industri, irigasi, galian c) 		<ul style="list-style-type: none"> • Sektor-sektor yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan adalah sektor pertanian, pendidikan, kesehatan keluarga, kesejahteraan keluarga, dan infrastruktur 		
				<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik wilayah • Jalan • Irigasi • Listrik 		<ul style="list-style-type: none"> • Deskriptif 		
3.	Ali, Ifzal & Pernia, Erensto. 2003. <i>Infrastructure and Poverty Reduction- What is the</i>	<i>ERD Policy Brief Series. Economic and Research Department. Asian Development</i>	1. Mengetahui infrastruktur yang berpengaruh dalam kemiskinan			<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur jalan, irigasi, dan listrik harus ditingkatkan untuk pengentasan kemiskinan di beberapa negara seperti Indonesia, 	Variabel dan perbandingan kemiskinan Indonesia dengan kemiskinan di negara	Pada penelitian Ali, menggunakan variabel irigasi, sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel sarana

No	Sumber/Judul	Jenis Publikasi	Tujuan	Variabel	Metode Analisis	Output	Diadopsi dari Penulis	Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu
	<i>Connection?</i>	<i>Bank</i>				Vietnam, Filipina.	berkembang.	penunjang pariwisata
4	Seetanah, et al. 2009. <i>Does Infrastructure Alleviate Poverty In Developing Countries?</i>	Jurnal Internasional.	1. Mengetahui infrastruktur yang berpengaruh dalam kemiskinan di negara berkembang	<ul style="list-style-type: none"> • Jalan • Listrik 	• Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur jalan dan listrik harus ditingkatkan untuk pengentasan kemiskinan di negara berkembang seperti RRC dan Vietnam. 	Mengadopsi variabel untuk dijadikan variabel penelitian (lebar listrik dan jalan)	Pada penelitian Seetanah, infrastruktur yang digunakan hanya 2, sedangkan pada penelitian ini menggunakan 8 variabel infrastruktur
5.	Ulimaz, M. dkk. 2013. <i>Permodelan Hubungan Pelayanan Infrastruktur Terhadap Benefit In Kind Masyarakat Miskin</i>	Jurnal Publikasi.	1. Mengetahui hubungan pelayanan infrastruktur terhadap <i>benefit in kind</i> berupa pendidikan, kesehatan dan ekonomi.	<ul style="list-style-type: none"> • Manfaat pendidikan • Manfaat ekonomi • Manfaat kesehatan • Aksesibilitas • Tingkat sarana • Kapasitas sarana • Lebar trotoar • Luas parkir • Luas ruang terbuka • Penerangan • Keamanan • Kunjungan • Intensitas kegiatan 	• Analisis Regresi Spasial	<ul style="list-style-type: none"> • Permodelan infrastruktur terhadap <i>benefit in kind</i> ekonomi, kesehatan, pendidikan di Kecamatan Klojen. 	Metode analisis regresi spasial	Pada penelitian Ulimaz, menggunakan variabel infrastruktur dan regresi spasial, tapi pada penelitian ini ditambahkan variabel kondisi sosial.
6	Ari, Ismu Rini et al. 2013.	Procedia Environmental	1. Mengetahui bagaimana kondisi	Kondisi Sosial:	SNA (Social	Partisipasi komunitas dalam menejemen air	Variabel dan cara	Pada penelitian Ismu Rini, tidak

No	Sumber/Judul	Jenis Publikasi	Tujuan	Variabel	Metode Analisis	Output	Diadopsi dari Penulis	Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu
	<i>Community Participation On Water management : Case Singosari District, Malang Regency, Indonesia.</i>	Science	sosial masyarakat berpengaruh terhadap penyediaan dan akses air bersih di Singosari, Malang.	<ul style="list-style-type: none"> • Ikatan Sosial • Persepsi Masyarakat 	Network Analysis) : • Degree	bersih di Singosari, Kabupaten Malang	pengambilan data	membahas kemiskinan, namun terkait kondisi sosial
7	Wahyu, Veibry. 2014. Permodelan Spasial Indikator Kemiskinan Dengan Prasarana di Kabupaten Malang	Skripsi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya	1. Mengidentifikasi gambaran umum kemiskinan, infrastruktur jalan, air bersih, dan listrik di Kabupaten Malang.	Jalan Listrik Air Bersih	Multiple Spasial Regresi Dengan Geoda	Permodelan Spasial Indikator Kemiskinan Dengan Prasarana di Kabupaten Malang	Variabel dan metode analisis	Pada penelitian Veibry variabel yang digunakan hanya infrastruktur, sedangkan penelitian ini mengkaitkan kemiskinan, infrastruktur dan kondisi sosial
8	Heri Wahyudi. 2012. <i>Pariwisata, Pengentasan kemiskinan dan MDG's.</i>	Prosiding Nasional	1. Mengetahui dampak pariwisata terhadap pengentasan kemiskinan dan MDG's	Keterkaitan pariwisata dan kemiskinan Keterkaitan pariwisata dengan kondisi sosial	Metode Social Accounting Matrix (SAM)	Pariwisata, Pengentasan kemiskinan dan MDG's.	Keterkaitan variabel pariwisata dengan variabel y dan variabel x lainnya	Pada penelitian Heri hanya mengkaitkan pariwisata dengan kemiskinan, namun pada penelitian ini pariwisata merupakan salah satu bagian infrastruktur yang dibahas

